

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



DAFTAR ISI

Table of Contents

DAFTAR ISI	0
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
PENDAHULUAN.....	4
▪ LATAR BELAKANG.....	4
▪ KONDISI UMUM	5
▪ KEGIATAN TEROBOSAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2020 - 2024	12
▪ POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	15
▪ ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	17
▪ ANALISIS SWOT	19
VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS.....	21
▪ VISI	21
▪ MISI.....	21
▪ TUJUAN.....	22
▪ SASARAN STRATEGIS	22
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	24
▪ ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL.....	24
▪ ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.	25
▪ ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA.....	26
▪ KERANGKA REGULASI.....	29
▪ KERANGKA KELEMBAGAAN	29
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	31
▪ INDIKATOR KINERJA PROGRAM.....	31
▪ KERANGKA PENDANAAN	33
PENUTUP	35



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 0-1 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA..... 30



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 REALISASI KLSUTER KAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA 2020 – 2024 7

PENDAHULUAN

▪ LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Renstra DJPB) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPB, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dapat di revisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama transformasi Indonesia yang menargetkan kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen dengan Landasan Transformasi diantaranya : (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya diperlukan Renstra DJPB Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Renstra KKP. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budi daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan perikanan budi daya dalam lima tahun ke depan bagi

pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi dan akademisi. Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

▪ **KONDISI UMUM**

• **CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 – 2024**

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020 – 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan budi daya terhadap sektor perikanan nasional dan meningkatkan produksi perikanan budi daya berkelanjutan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perbenihan Ikan;
2. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan;
3. Pengelolaan Produksi dan Usaha;
4. Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan; dan
5. Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PB Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Rata-rata pendapatan pembudidaya Rp3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp3.700.000,- pada tahun 2024
2. Meningkatnya Ekonomi sektor perikanan budi daya dengan indikator Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari Perikanan Budi Daya sebesar Rp19,14 Milyar di tahun 2020 dan Rp23,77 Milyar di tahun 2024
3. Pengelolaan Kawasan perikanan budi daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;

- c. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
4. Meningkatkan produksi perikanan budi daya dengan indikator kinerja :
 - a. Produksi Perikanan Budi Daya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi ikan hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.

Dari target indikator di atas, capaian kinerja IKU Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Selama kurun waktu 2020-2024 NTPi mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen per tahun sedangkan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya ikan (NTUPi) mengalami kenaikan sebesar 1,64 persen per tahun. Naiknya nilai tukar ini disebabkan naiknya indeks diterima oleh pembudidaya ikan setiap tahunnya sehingga nilai tukar usaha terus naik. Realisasi NTPi adalah 100,55 pada tahun 2020 dan 102,08 pada tahun 2024.

Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budi daya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut. Realisasi pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2020 sebesar Rp3.544.245,- pada tahun 2020 dan Rp5.130.000,- pada tahun 2024.

Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Nilai PNBP dari Perikanan Budi Daya sebesar Rp23,50 Milyar di tahun 2020 dan Rp117,01 Milyar di tahun 2024. Realisasi PNBP mengalami kenaikan rata-rata sebesar 120 persen dibanding target dikarenakan terdapat setoran PNBP hasil panen udang vaname BUBK Kebumen, adanya peningkatan permintaan pakan mandiri, dan telah ditetapkannya tiga satker UPT DJPB menjadi satker BLU yakni BBPBAP Jepara, BLUPPB Karawang dan BPBAP Situbondo.



Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budi Daya

Dalam perjalanannya, indikator ini ditetapkan sampai dengan tahun 2021 saja karena terdapat perubahan kebijakan MKP. Capaian SKPT tahun 2020 adalah 3 lokasi dan 4 lokasi pada tahun 2021.

Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan

Pengelolaan kluster kawasan budi daya berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan perikanan budi daya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan keberlanjutan lingkungan. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan kawasan dengan memadukan aspek teknologi budidaya, manajemen usaha, serta tata kelola sumber daya yang ramah lingkungan.

Kluster budi daya dikembangkan sebagai model pengelolaan tambak terpadu yang melibatkan para pembudidaya secara kolektif dalam satu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi, akses pasar yang lebih baik, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana produksi.

Tabel 1. 1 Realisasi Klsuter Kawasan Perikanan Budi Daya 2020 – 2024

2020	Realisasi				2024		Kenaikan Rata-rata 2020-2024
	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%Capaian	
7	10	30	50	50	50	100	77,38

Program percontohan pengelolaan kluster kawasan budi daya berkelanjutan dilaksanakan oleh sejumlah satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, antara lain:

- Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee
- Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo
- Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang

Masing-masing UPT memiliki peran strategis dalam pengembangan kluster berdasarkan komoditas unggulan dan potensi wilayah masing-masing.

Sejak dimulainya program pada tahun 2020, jumlah kawasan kluster budi daya terus mengalami peningkatan signifikan sebagai hasil dari revitalisasi tambak tradisional dan pembangunan infrastruktur budidaya modern.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan penerapan konsep pengelolaan kawasan yang berbasis kluster dan integrasi rantai pasok. Setiap kluster umumnya mencakup area seluas 10–50 hektare dengan partisipasi ratusan pembudidaya. Capaian

Setiap kluster dikembangkan dengan prinsip pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, meliputi:

1. Penggunaan benih unggul dan pakan berkualitas
2. Sistem pengairan terpadu dan ramah lingkungan
3. Monitoring kualitas air dan kesehatan ikan secara berkala
4. Pendampingan teknis dan pelatihan intensif kepada pembudidaya
5. Penguatan kelembagaan usaha dan kemitraan dengan industri pengolahan

Pengembangan kluster telah memberikan dampak positif bagi pembudidaya dan lingkungan, antara lain:

- Meningkatnya produktivitas tambak hingga 30–50%
- Peningkatan kualitas produk akibat penerapan sistem budidaya berstandar nasional dan internasional
- Penurunan risiko pencemaran lingkungan melalui sistem pengelolaan limbah terpadu
- Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya
- Memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen udang dan bandeng berkelanjutan di pasar global

Korporasi Perikanan Budi Daya

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat posisi ekonomi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mulai menginisiasi pengembangan Korporasi Perikanan Budi Daya sejak tahun 2023. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendorong transformasi struktur usaha dari skala mikro/kecil menuju bentuk kelembagaan yang lebih besar dan modern, sehingga memiliki daya tawar yang lebih tinggi di pasar serta akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan dan teknologi.

Korporasi perikanan budi daya pada dasarnya merupakan wadah kolaboratif berbasis kelompok usaha bersama atau koperasi yang menggabungkan sejumlah pembudidaya ikan dalam suatu kawasan tertentu. Melalui korporasi ini, pembudidaya tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga

memperkuat rantai pasok, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar baik domestik maupun internasional.

Sejak pertama kali dimasukkan sebagai indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2023, program Korporasi Perikanan Budi Daya telah menunjukkan progres positif:

- Tahun 2023 : Terbentuknya 10 kelompok korporasi di beberapa sentra produksi perikanan budi daya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
- Tahun 2024 : Peningkatan jumlah korporasi menjadi 15 kelompok , dengan penambahan lokasi di Kalimantan Timur dan Bali.

Setiap korporasi umumnya terdiri atas 20–50 pembudidaya , dengan total anggota mencapai ratusan pembudidaya di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing korporasi dilengkapi dengan sistem manajemen usaha kolektif, unit layanan teknis, serta kemitraan dengan pelaku industri, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha.

Pembentukan korporasi perikanan budi daya telah memberikan dampak nyata bagi pembudidaya, antara lain:

- Peningkatan efisiensi biaya produksi hingga 15–20% melalui pembelian sarana produksi secara kolektif.
- Akses pembiayaan yang lebih mudah , dengan dukungan kredit usaha rakyat (KUR) dan skema pembiayaan syariah.
- Penguatan bargaining position dalam negosiasi harga dengan pembeli atau eksportir.
- Peningkatan kapasitas manajerial dan keterampilan teknis melalui pelatihan dan pendampingan intensif.
- Percepatan adopsi teknologi budidaya modern dan digitalisasi rantai pasok.

Produksi Perikanan Budi Daya

Produksi perikanan budi daya nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil, meskipun masih memerlukan percepatan untuk mencapai target produktivitas yang lebih tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (2024), berikut adalah capaian volume produksi perikanan budi daya dari tahun 2019 hingga 2024:



Tabel 1. 2Capaian Volume Produksi Perikanan Budi Daya 2019 - 2024

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Udang Vaname	683.000	701.000	724.000	758.000	792.000	831.000
2	Bandeng	572.000	594.000	608.000	623.000	639.000	657.000
3	Nila	1.010.000	1.050.000	1.090.000	1.130.000	1.170.000	1.210.000
4	Lele	1.370.000	1.420.000	1.470.000	1.520.000	1.570.000	1.620.000
5	Gurame	342.000	356.000	364.000	373.000	384.000	396.000
6	Patin	892.000	921.000	943.000	966.000	991.000	1.020.000
7	Rumput Laut	10.200.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000	11.700.000
8	Kerapu	121.000	125.000	129.000	133.000	137.000	142.000
9	Kakap Merah	63.000	66.000	68.000	70.000	72.000	75.000
10	Kepiting Bakau	49.000	51.000	53.000	55.000	57.000	59.000
11	Lobster Air Tawar	1.200	1.400	1.700	2.100	2.600	3.200

Rata-rata pertumbuhan tahunan produksi perikanan budi daya selama periode 2019–2024 mencapai sekitar 2,65 persen per tahun , dengan fluktuasi antar-tahun akibat berbagai faktor seperti gangguan pandemi (2020–2021), ketersediaan benih, serta dinamika harga pasar dan iklim.

Pada tahun 2020, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 9,44% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh kebijakan intensifikasi budidaya dan program revitalisasi tambak udang dan bandeng. Setelah itu, laju pertumbuhan cenderung stabil pada kisaran 3,5–4,25 persen per tahun .

Kenaikan produksi secara keseluruhan didukung oleh beberapa komoditas unggulan yang dikembangkan melalui pendekatan kluster dan industrialisasi budi daya, antara lain:

1. Udang Vaname

Udang vaname merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Selama lima tahun terakhir, produksi udang vaname mengalami peningkatan yang cukup signifikan, didukung oleh revitalisasi tambak intensif, penggunaan benih unggul, serta pengembangan kluster budidaya laut.

2. Bandeng

Bandeng merupakan komoditas tradisional yang tetap menjadi primadona di pasar domestik. Pengembangan budidaya bandeng berbasis kawasan dan ramah lingkungan turut mendukung peningkatan produktivitas.

3. Nila
Nila menjadi komoditas air tawar unggulan yang banyak dibudidayakan di kolam tanah, KJA waduk, dan sawah. Permintaan pasar domestik yang tinggi menjadikan nila sebagai komoditas strategis.
4. Lele
Lele memiliki permintaan pasar yang stabil karena harganya relatif terjangkau dan populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah.
5. Gurame
Gurame menjadi komoditas premium dengan permintaan tinggi untuk sektor restoran dan ekspor benih.
6. Patin
Patin merupakan komoditas air tawar unggulan di Kalimantan dan Sumatera, dengan potensi pasar domestik dan ekspor.
7. Rumput Laut
Rumput laut menjadi salah satu komoditas bernilai ekspor tinggi, digunakan dalam industri kosmetik, farmasi, dan makanan.
8. Kerapu
Kerapu memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas ekspor ke Asia Timur, khususnya Tiongkok dan Hong Kong.
9. Kakap
Kakap merah memiliki permintaan tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor, terutama ke pasar ASEAN dan Tiongkok.
10. Kepiting
11. Lobster

Capaian volume produksi perikanan budi daya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti Industrialisasi perikanan budi daya, Penguatan broodstock center, dan Pengembangan system produksi

Produksi ikan hias

Realisasi volume produksi ikan hias sebesar 1,43 miliar ekor pada tahun 2020 dan 1,45 miliar ekor pada tahun 2024 atau mencapai 88,12 persen dari target sebesar 1,73 miliar ekor. Peningkatan produksi ikan hias dipengaruhi oleh semakin diminatnya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, seperti arwana yang mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa. Nilai ekspor ikan hias juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan terbukti dengan meningkatnya

peringkat Indonesia dalam negara pengekspor ikan hias di dunia menjadi peringkat dua terbesar (data trademap 2023). Di samping itu semakin membaiknya kondisi pandemi COVID-19 juga memberikan pengaruh yang cukup baik bagi perkembangan budi daya ikan hias. Dukungan terhadap budi daya ikan hias diwujudkan dengan penetapan beberapa kampung ikan hias diantaranya di Bogor, Karawang, Blitar dan Kediri.

▪ **KEGIATAN TEROBOSAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2020 – 2024**

Ditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan berbagai kegiatan terobosan dalam kurun waktu 2020-2024. Kegiatan terobosan tersebut secara langsung dapat diterima manfaatnya oleh pembudidaya dan diharapkan dapat mempunyai dampak dalam peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan budi daya.

Kampung Perikanan Budi Daya

Membangun kampung-kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal menjadi salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga 2024. Pembangunan kampung perikanan budi daya di 210 Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis KKP dalam rangka menggenjot produktivitas dan nilai tambah ikan di Indonesia. Mulai dari pengembangan sistem perbenihan yang fokus pada produksi varian komoditas unggul yang potensial dikembangkan dan menjamin sistem logistik benihnya secara efisien. Kemudian pengembangan sistem produksi yang fokus pada penciptaan efisiensi produksi, dan produktivitas budidaya. Upaya ini meliputi pengembangan inovasi teknologi yang aplikatif, efisien dan adaptif, pengembangan pakan mandiri yang efisien, dan penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Lalu penguatan kapasitas SDM para pelaku dan kelembagaan di sentra-sentra produksi, serta mendorong pengembangan sistem bisnis terintegrasi (*integrated aquaculture business*) di sentra produksi untuk menjamin efisiensi dan market. Karakteristik kampung perikanan budidaya adalah memiliki komoditas unggulan atau komoditas lokal yang bernilai ekonomis tinggi, komoditas unggulan yang dimaksud sudah menjadi kearifan lokal, masyarakat melakukan kegiatan pembudidayaan sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu di wilayah tersebut terdapat kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi korporasi.

Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan

Program modeling budidaya rumput laut di Rote Ndao seluas 50 hektar diarahkan pada sistem pengelolaan budidaya rumput laut yang terintegrasi berbasis kawasan dan mengimplementasikan konsep ekonomi biru, sehingga akan mampu meningkatkan produksi maupun produktivitas untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan usaha budidaya. Potensi lahan yang berpotensi dikembangkan untuk kegiatan budidaya rumput laut di Rote Ndao mencapai seluas 32 ribu hektare. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat baru sekitar 6,9% lahan yang termanfaatkan untuk budidaya rumput laut.

Selain Rote Ndao, DJPB juga berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mewujudkan rencana pembangunan modelling budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sinergi tersebut meliputi penyediaan lahan untuk modelling, sarana dan infrastruktur pendukung serta penyiapan industri hilirisasi rumput laut. Strategi modelling untuk meningkatkan produksi sekaligus mengembangkan hilirisasi rumput laut di dalam negeri, dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama kegiatan budidaya di sektor hulu. Setelah diresmikan akhir tahun 2024 oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Kawasan budidaya rumput laut seluas 51,25 hektare tersebut sukses menghasilkan sekitar 250 ton.

Budi Daya Nila Salin Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling ikan nila salin berbasis kawasan ini nantinya bisa menjadi menjadi contoh bagi pelaku usaha budidaya ikan nila salin dan mengundang investor dalam pengembangan budidaya ikan nila salin. Modelnya tidak menimbulkan persoalan bagi lingkungan karena pembangunannya kami tata dengan baik seperti bagaimana intake dan outletnya, tandonnya dan sistem pengairannya. Selain itu yang paling penting, kami tidak membuang langsung air buangan ke laut, melainkan ada proses purifikasi terlebih dulu, dan pohon mangrove terus dijaga kelestariannya dan dikembangkan luasannya, modeling ikan nila salin berbasis kawasan diharapkan bisa meningkatkan produktivitas budidaya sebesar 87,7 ton per hektare per siklus. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari tambak nila salin tradisional yang hanya sekitar 0,6 ton per hektare per tahun. biaya investasi pembangunan fasilitas sarana prasarana modeling nila salin berbasis kawasan mencapai Rp76 miliar. Produktivitas modeling diharapkan bisa mencapai sekitar 7.020 ton per siklus atau senilai Rp210,6 miliar dengan asumsi harga jual ikan nila salin Rp30 ribu per kg. Dari

asumsi hitungan ekonomi dengan harga pokok produksi Rp24.500 per kg, modeling akan menghasilkan keuntungan sekitar Rp38,6 miliar.

Budi Daya Kepiting Berbasis Kawasan

Modeling Kepiting dilaksanakan di Pasuruan, Jawa Timur di lahan seluas 20 hektar dengan anggaran Rp10,4 Miliar. Diharapkan melalui program modeling budidaya kepiting, nantinya akan meningkatkan ekspor kepiting Indonesia menjadi USD476 juta pada 2024

Budi Daya Lobster Berbasis Kawasan

Pembangunan modeling ini merupakan tindak lanjut implementasi terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*). Pembangunan modeling ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat peran Indonesia dalam pengelolaan lobster. Beberapa hal yang selama ini menjadi kelemahan dalam pembudidayaan lobster akan diperbaiki dalam melalui modeling ini. Modeling Lobster dibangun di Lokasi BPBL Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Batam merupakan daerah sumber pakan yang sangat mendukung untuk budi daya lobster. Hal ini merupakan kunci kesuksesan dari suatu proses budi daya.

Major Project Revitalisasi Udang dan Bandeng

Program Revitalisasi Udang dan Bandeng merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan ekspor. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan, proyek ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementan, serta berbagai lembaga riset seperti BRIN. Target yang ditetapkan diantaranya kenaikan produksi udang dari 2,1 juta ton ke 3,5 juta ton dan bandeng dari 1,2 juta ton ke 1,8 juta ton pada 2024.

Pengembangan *Broodstock Center*

Broodstock Center adalah fasilitas yang dikembangkan untuk menghasilkan benih unggul (benur/benih) yang sehat dan tahan penyakit. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada impor benih, meningkatkan produktivitas budidaya, dan memastikan kualitas produk ekspor. Proyek ini menjadi bagian dari Program Revitalisasi Udang dan Bandeng yang merupakan peran Ditjen Perikanan

Budi Daya yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. *Broodstock Center* telah di bangun di 3 lokasi yakni Mesuji, Musi Rawas dan Dharmasraya

▪ **POTENSI DAN PERMASALAHAN**

POTENSI

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km². Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024). Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) .

Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton , menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun , menurut proyeksi FAO (2023).

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap merah (*Lutjanus sp.*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele dumbo (*Clarias gariepinus*), Gurame (*Osphronemus goramy*), Rumput laut (*Eucheuma sp.* , *Gracilaria sp.* , *Sargassum sp.*), Ikan hias (Arwana, Cupang, Oscar, dll.), dan Kepiting bakau (*Scylla serrata*).

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah darat, pesisir, dan laut lepas, antara lain: Budidaya air tawar meliputi kolam tanah, kolam beton, keramba jaring apung (KJA) di waduk, danau, dan sungai, dengan total luasan mencapai lebih dari 1,5 juta hektare . Budidaya air payau : tambak tradisional dan intensif di kawasan pesisir, dengan luas potensial mencapai 2,1 juta hektare , meskipun baru sekitar 1,2 juta hektare yang dimanfaatkan secara aktif. Budidaya laut : meliputi keramba jaring apung laut (KJAL), rumput laut, mutiara, dan budidaya kepiting/lobster di laut, dengan potensi ruang laut yang dapat dialokasikan mencapai 12 juta hektare (KKP, 2024). Selain itu, model integrasi seperti mina padi (padi-ikan) di areal persawahan menjadi alternatif pengembangan budi daya di lahan pertanian dengan sistem

pertanian terpadu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2023), luas sawah di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare , dengan potensi pemanfaatan sebagian untuk mina padi.

Subsektor perikanan budi daya juga memiliki kontribusi signifikan dalam perdagangan internasional. Nilai ekspor produk perikanan budi daya pada tahun 2024 mencapai USD 5,2 miliar , didominasi oleh udang vaname, rumput laut, dan ikan hias. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua pengekspor ikan hias terbesar di dunia, setelah Singapura, menurut data Trademap (2023).

Dengan meningkatnya permintaan global akan produk pangan asal laut yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi biru, potensi pengembangan perikanan budi daya Indonesia masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui pendekatan inovatif, teknologi tepat guna, dan regulasi yang kondusif.

PERMASALAHAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budidaya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala struktural yang menghambat pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, berikut rangkuman tantangan beserta dampaknya:

Keterbatasan Distribusi Induk dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul (SPF) masih menjadi masalah krusial. Saat ini, 70% benih udang vanamei diimpor dari Thailand, Vietnam, dan Filipina, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan nasional (KKP, 2023). Bahkan, Broodstock Center di Bali dan Aceh yang bertujuan mengurangi ketergantungan impor baru mampu memproduksi 1 miliar benur/tahun , jauh dari target 3 miliar benur pada 2024. Keterbatasan akses benih berkualitas ini menyebabkan petani di daerah terpencil terpaksa menggunakan benih lokal rentan penyakit, berisiko menurunkan produktivitas hingga 50% (AEPUDI, 2023).

Tingginya Biaya Pakan

Biaya pakan mendominasi 60–70% dari total biaya produksi budidaya (FAO, 2022). Ketergantungan pada impor bahan baku seperti tepung ikan dan minyak nabati menyebabkan nilai impor pakan mencapai USD 1,2 miliar/tahun (BPS, 2023). Akibatnya, banyak petani kecil beralih ke pakan murah dengan kualitas rendah (Rp 8.000–10.000/kg), yang mengandung protein di bawah standar. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ikan/udang tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran air akibat limbah pakan (BRIN, 2023).

Daya Cerna Nutrisi Tidak Optimal

Efisiensi pakan di tambak tradisional masih rendah, dengan rata-rata FCR (rasio konversi pakan) mencapai 2,5–3,0, jauh lebih tinggi dibandingkan sistem modern (1,2–1,5) (LIPI, 2023). Ketidakefisienan ini menyebabkan pemborosan pakan hingga Rp 2,5 triliun/tahun dan peningkatan limbah organik yang merusak kualitas air (KKP, 2022).

Serangan Hama dan Penyakit

Penyakit seperti *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan *Enterocytozoon hepatopenaei* (EHP) menyebabkan 30–40% produksi udang gagal panen setiap tahun (AEPUDI, 2023). Di Jawa Timur, 20% tambak udang terinfeksi EHP pada 2023, mengakibatkan kerugian hingga Rp 500 miliar (Dinas Perikanan Jatim, 2023). Sistem biosekuriti yang lemah dan perubahan iklim semakin memperparah risiko penyebaran penyakit.

Pencemaran Lingkungan

80% limbah tambak (pakan sisa, kotoran ikan) tidak dikelola, menyebabkan peningkatan kadar amonia hingga 1,5–2,0 mg/liter (melebihi ambang aman) dan sedimentasi di pesisir (KLHK, 2023). Penggunaan antibiotik dan pestisida berlebihan juga memicu resistensi mikroba, mengancam kelestarian ekosistem akuatik.

Perubahan Parameter Lingkungan

Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu air laut rata-rata 0,5–1,0°C dalam 10 tahun terakhir, memicu stres pada udang dan menurunkan imunitas (BMKG, 2023). Di Aceh, 25% tambak gagal panen akibat fluktuasi salinitas pasca-tsunami (Universitas Syiah Kuala, 2023). Kondisi ini diperparah oleh pencemaran dari aktivitas industri di sekitar kawasan tambak.

Lemahnya Pengendalian Tata Ruang

Alih fungsi lahan tambak yang tidak terkendali menyebabkan 1,5 juta hektare lahan tumpang tindih dengan kawasan mangrove atau permukiman (KLHK, 2023). Konversi mangrove menjadi tambak telah merusak 2,5 juta hektare hutan bakau sejak 1980-an, menghilangkan fungsi ekosistem sebagai penyangga alami (Kementerian LHK, 2022).

■ ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun sektor perikanan budi daya antara lain :

- (a) Pengembangan Budi Daya Ramah Lingkungan, berkelanjutan dan berkeadilan

Strategi ini terdiri atas lima elemen kunci strategis yaitu :

- Penataan dan penentuan daya dukung serta pemetaan Kawasan budi daya
Menentukan kapasitas lingkungan setiap kawasan budi daya untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memetakan zonasi budi daya berbasis ekosistem, seperti memprioritaskan kawasan pesisir yang sesuai untuk setiap komoditas perikanan budi daya misalnya udang, bandeng atau rumput laut;
- Penataan dan penyediaan prasarana Kawasan budi daya teknologi semi intensif dan intensif
Mengembangkan prasarana modern seperti bioflok, *Recirculating Aquaculture System* (RAS), dan tambak berbasis digital (IoT), serta meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi air dan pakan.
- Pengelolaan air buangan dan rendah emisi
Menerapkan teknologi pengolahan limbah (IPAL) dan daur ulang air untuk menekan pencemaran. Mengurangi emisi karbon dengan beralih ke energi terbarukan dan penggunaan pupuk organik.
- Prasarana Budi Daya Ekstensif berbasis Komunitas
Membangun infrastruktur bersama seperti sistem irigasi terpadu, tandon air komunal, dan IPAL berbasis masyarakat, memastikan petani skala kecil dapat mengakses sumber daya secara adil untuk meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.
- Budi daya organik serta penggunaan Energi Baru dan terbarukan
Menggalakkan praktik budi daya organik tanpa bahan kimia sintetis seperti probiotik dan pakan alami. Memanfaatkan energi baru terbarukan (tenaga surya, biogas) untuk mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional.

(b) Peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi

Inovasi dan peningkatan teknologi yang diaplikasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan adalah salah satu upaya dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya lahan pada kegiatan perikanan budi daya. Penerapan Bioflok meningkatkan produktivitas hingga 10-15 ton/ha/tahun dibanding tambak tradisional yang hanya 3-5 ton/ha/tahun. RAS juga menghemat air hingga 90 persen dan menekan risiko penyakit dengan sistem tertutup. Di samping itu, pencapaian efisiensi juga dapat dilakukan melalui penggunaan benih unggul, pakan

yang efektif sesuai kebutuhan spesifik komoditas, serta efisiensi proses produksi.

- (c) Peningkatan nilai tambah produk dan akses pasar
Menerapkan Strategi Biaya Rendah (*Low-Cost Strategy*) melalui integrasi hulu-hilir dalam sistem bisnis perikanan, sehingga produk lebih terjangkau dan dapat meningkatkan pangsa pasar di segmen menengah ke bawah. Mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga bahan baku dengan sistem penyimpanan terpadu.
Strategi Penciptaan Nilai (*Value Creation Strategy*) melalui pengembangan produk bernilai tinggi (premium) dapat dijual dengan margin keuntungan lebih besar, serta manajemen mutu yang bisa membuka akses ke pasar global (ekspor) dan konsumen yang peduli kualitas/berkelanjutan.
- (d) Penguatan SDM, kelembagaan, regulasi dan pengawasan
Penguatan kapasitas sumber daya manusia atau *capacity building* dilakukan terhadap seluruh *stakeholders* perikanan budi daya seiring dengan perkembangan implementasi Ekonomi Biru. Strategi ini ditujukan untuk mewujudkan kegiatan perikanan budi daya yang inklusif secara sosial sebagai salah ciri Ekonomi Biru. *Capacity building* tidak hanya dilakukan terhadap pembudi daya dan pelaku usaha, melainkan terhadap petugas dinas, penyuluh, serta staf teknis kementerian dan lembaga. Adapun kelembagaan implementasi strategi Ekonomi Biru dan penerapan regulasi perikanan budi daya melibatkan unit kerja serta organisasi pemerintah di pusat dan daerah sampai dengan kelembagaan masyarakat.

▪ **ANALISIS SWOT**

Analisis SWOT mempunyai peran penting dalam perencanaan strategis di sektor perikanan. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal, pemangku kepentingan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel berikut diperlukan penguatan faktor kekuatan dan pengurangan kelemahan melalui strategi

Tabel 1. 3 Analisis SWOT Perikanan Budi Daya

<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
1. Potensi sumber daya alam yang besar Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia 2. Keanekaragaman hayati ikan budi daya yang tinggi serta lahan budidaya potensial 3. Komoditas unggulan ekspor dengan nilai tinggi 4. Adopsi teknologi modern untuk peningkatan produktivitas	1. Ketergantungan pada teknologi tradisional dan rendahnya adopsi teknologi hemat energi dan sistem pengolahan limbah 2. Tingginya ketergantungan impor bahan baku pakan menyebabkan biaya produksi tinggi 3. Pencemaran air, alih fungsi lahan mangrove, dan penurunan kualitas tambak akibat penggunaan bahan kimia berlebihan 4. 80% pembudidaya masih minim pengetahuan tentang teknik budidaya modern dan manajemen risiko
<i>Opportunities (O)</i>	<i>Threats (T)</i>
1. Tren pasar internasional yang memprioritaskan produk bersertifikasi ASC, MSC, atau Global Gap 2. Peningkatan investasi dan teknologi akuakultur modern 3. Potensi peningkatan ekspor ke pasar non-tradisional 4. Penggunaan platform e-commerce dan sistem logistik terintegrasi untuk memperluas akses terintegrasi untuk memperluas akses pasar 5. Dukungan PHLN dan sumber pendanaan potensial lainnya untuk proyek perikanan budi daya berkelanjutan	1. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu air laut, perubahan salinitas dan cuaca ekstrem mengancam kelangsungan budi daya 2. Persaingan global dan kompetisi dengan Vietnam, Thailand dan India yang lebih maju dalam teknologi dan akses pasar

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

- **VISI**

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**.”

- **MISI**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 3 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- (a) **“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- (b) **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- (c) **“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2 yaitu **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”**

▪ **TUJUAN**

Tujuan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025 – 2029 meliputi :

1. Meningkatnya produktivitas sektor perikanan budi daya
2. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

▪ **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (outcome) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran strategis (SS) DJPB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SS 1. Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan yang berkelanjutan

SS 2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produktivitas perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :
 - a) Volume Produksi Rumput Laut (Juta Ton) 11,64 di 2025 dan 14,14 di 2029
 - b) Volume Produksi Ikan Budi Daya (Juta Ton) 6,75 di 2025 dan 8,52 di 2029
2. Sasaran Strategis ke-dua (SS-2). Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan Perikanan Budi Daya dengan Indikator Kinerja :
 - a) Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) 86 di 2025 dan 88 di 2029;
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen) 85 di 2025 dan 89 di 2029;

- c) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen) <0,5 di 2025 sd 2029
- d) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen) dengan nilai 81 di 2025 dan 85 di 2029
- e) Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) 76 di 2025 dan 80 di 2029
- f) Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan nilai 84 di 2025 dan 84,6 di 2029
- g) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan nilai 92 di 2025 dan 92,2 di 2029
- h) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan nilai 81,5 di 2025 dan 82,5 di 2029
- i) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan nilai 3,5 di 2025 dan 3,9 di 2029
- j) Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks) dengan nilai 87 di 2025 dan 89 di 2029
- k) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen) dengan nilai 96 dan 100 di 2029
- l) Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen) dengan target 100 persen dari 2025 sampai dengan 2029
- m) Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan nilai 80 di 2025 dan 84 pada 2029
- n) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen) dengan target 76 di 2025 dan 80 di 2029
- o) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen) dengan target 65 pada 2025 dan 85 pada 2029
- p) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai) dengan target 77 di 2025 dan 81 di 2029.



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

- **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL**
Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, kemiskinan menuju 0 persen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Adapun Arah kebijakan KKP terkait pembangunan perikanan budi daya adalah melalui pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yang merupakan Misi Asta Cita dari Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan wakil Presiden terpilih.
Strategi pembangunan perikanan budi daya sesuai dengan RPJMN 2025 – 2029 tercantum dalam table sebagai berikut

Tabel 3. 1 Strategi Pembangunan Perikanan Budi Daya dalam RPJMN 2025 – 2029

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Rancangan Proyek Strategis
1	PN 2-Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada pangan	1. Kawasan sentra produksi pangan 2. Pengembangan lumbung pangan nasional 3. Modernisasi digitalisasi data pangan 4. Subsidi pupuk, akses benih, irigasi pertanian, alat mesin pertanian 5. Pengembangan pangan lokal, pangan hewani dan pangan akuatik 6. Fasilitasi akses pembiayaan untuk pelaku usaha budi daya dan nelayan.	1. Pengembangan klaster pangan akuatik unggulan 2. Pengembangan lumbung pangan desa: ikan, udang, dan rumput laut

No	Prioritas Nasional (PN)	Poin Penting Asta Cita	Intervensi KKP	Rancangan Proyek Strategis
		Ekonomi Biru	1. Pengembangan pangan akuatik: Klaster pangan akuatik unggulan dan lumbung pangan desa: ikan, udang, Rumput Laut 2. Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan	1. Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan
2	PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Ekonomi Domesik dan Global	Peningkatan ekspor produk perikanan dan industri berbasis SDA	Hilirisasi Rumput Laut
		Hilirisasi	Mengembangkan kawasan hilirisasi komoditas hasil penangkapan dan budidaya yang berkelanjutan	
5	PN-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kemiskinan	Kartu usaha	Kartu usaha afirmatif
		Perdesaan	Penguatan Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Pedesaan	Kampung Perikanan Budi Daya (KPB)
7	PN-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pembangunan Berketahanan Iklim dan Pengelolaan Risiko Bencana	1. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut 2. Resiliensi Masyarakat	

▪ **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Arah kebijakan Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025 yang sesuai dengan perikanan budi daya adalah :

Pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar (darat) yang ramah lingkungan

Kebijakan pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan tawar yang ramah lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan akuatik sebagai sumber pangan masa depan yang dapat diproduksi secara berkelanjutan. Melalui kebijakan ini akan diterapkan cara-cara berproduksi perikanan budi daya sesuai dengan standar dan ramah lingkungan pada sentra-sentra produksi perikanan budi daya sebagai lumbung pangan.

▪ **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA**

Arah kebijakan “Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan” diuraikan sebagai berikut:

- a. Penguatan regulasi yang komprehensif dan tersinkronisasi dengan baik antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
- b. Pembangunan/revitalisasi kawasan tambak yang terintegrasi hulu-hilir;
- c. Pengembangan modeling budi daya berbasis kawasan dan berbasis komoditas unggulan;
- d. Pembangunan kampung perikanan budidaya sebagai sentra produksi dan lumbung pangan desa;
- e. Fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budi daya serta mendorong adopsi teknologi untuk mewujudkan tata kelola perikanan budi daya modern;
- f. Pengembangan dan penyaluran induk dan benih unggul, pupuk, serta pakan kepada pembudi daya ikan dan rumput laut;
- g. Peningkatan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budi daya;
- h. Pengembangan, pembinaan, dan penerapan sertifikasi pada usaha perikanan budi daya;
- i. Integrasi kawasan perikanan budi daya ke dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi laut, serta penyelesaian perizinan dasar pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- j. Hilirisasi dan pengembangan industrialisasi rumput laut dan komoditas perikanan potensial lainnya hulu-hilir;
- k. Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha pada subsektor perikanan budi daya melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral;

- l. Penguatan kelembagaan pembudi daya berbasis korporasi dan agromaritim untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- m. Memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan budi daya produktif;
- n. Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan masyarakat untuk memperoleh ikan bermutu serta peningkatan konsumsi dan gizi masyarakat untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- o. Penguatan pasar luar negeri melalui penumbuhan jumlah eksportir, profiling dan intelejen pasar, diplomasi dan peningkatan akses pasar, kerjasama pemasaran, dan peningkatan peluang ekspor pada pasar yang telah ada dan pasar-pasar baru untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- p. Meningkatkan preferensi konsumsi masyarakat lokal terhadap konsumsi ikan budi daya;
- q. Penguatan tata kelola rantai pasok dan ketertelusuran dalam rangka konektivitas, kontinuitas, dan ketersediaan hasil perikanan
- r. Fasilitasi prasarana dan sarana rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran
- s. Meningkatkan investasi melalui promosi dan pendampingan investasi, serta kemudahan perizinan berusaha pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan;
- t. Penguatan kewirausahaan, kelembagaan dan akses pembiayaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan budidaya untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan;
- u. Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- v. Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan termasuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;
- w. Penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan dan standarisasi kompetensi, dan penyuluhan bagi pelaku utama subsektor perikanan budi daya untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya yang berkelanjutan;

- x. Peningkatan pengawasan dan kepatuhan pembudi daya ikan dan rumput laut;
- y. Pengembangan *ocean big data* untuk mendukung ketahanan pangan.

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Pembangunan perikanan budi daya tersebut diperkuat dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah mengembangkan tata Kelola birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang lincah, terintegrasi, dan berbasis digital, pengembangan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani, mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif, adaptif, dan berwawasan global, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan Ditjen Perikanan Budi Daya, serta penguatan pembangunan budaya BerAkhlak.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) Ditjen Perikanan Budi Daya. Pengarusutamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan perikanan budi daya tahun 2025-2029 meliputi:

1. Gender dan Inklusi Sosial
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Transformasi Digital
4. Pembangunan Rendah Karbon
5. Pembangunan Berketahanan Iklim

▪ **KERANGKA REGULASI**

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara. Ditjen Perikanan Budi Daya akan mendorong adanya harmonisasi regulasi, yakni menghilangkan tumpang tindih peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya antar kementerian/Lembaga, maupun dengan peraturan di tingkat daerah sesuai amanat Presiden yang berkaitan dengan penerapan omnibus law.

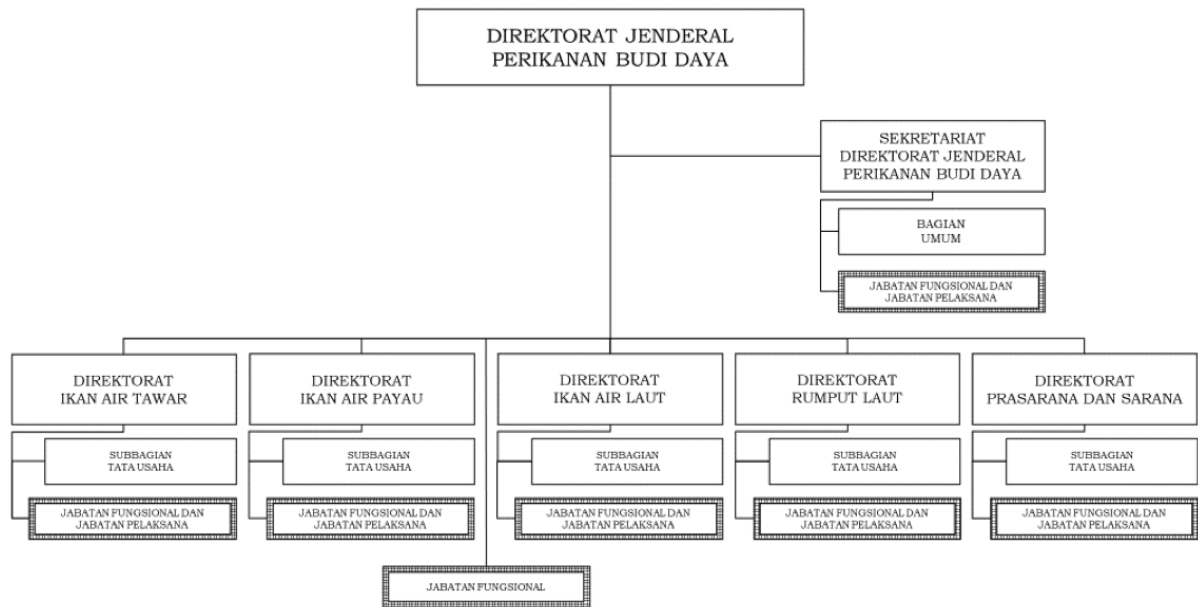
Kerangka regulasi yang akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi :

1. RUU
2. RPP
3. R Perpres
4. R Permen KP

▪ **KERANGKA KELEMBAGAAN**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen Perikanan Budi Daya yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budi Daya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Direktorat Teknis serta lima belas (15) Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di wilayah Republik Indonesia dengan gambaran struktur Organisasi sebagaimana berikut :



Gambar 0-1 Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budi Daya

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

■ INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik dan mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (Outcome) dari suatu program. Rumusan program mengacu pada konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I, tapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/Lembaga. Program dapat bersifat lintas unit Eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L.

Terdapat dua program yang dilaksanakan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan; dan
2. Program Dukungan Manajemen

Adapun indikator kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Meningkatnya produksi perikanan budi daya					
	Produksi perikanan budi daya (ikan)	6,75	7,11	7,5	7,98	8,49
	Produksi perikanan budi daya (rumput laut)	11,64	12,1	12,71	13,34	14,01
2.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103.25	103.5	103.75	104	104.25
Program Dukungan Manajemen						
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85	86	87	88	89
2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program	81	82	83	84	85



No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)					
4.	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76	77	78	79	80
5.	Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80
6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92,00	92,10	92,15	92,20	92,20
7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50
8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
9.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	87	87,50	88	88,50	89
10.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	96	97	98	99	100
11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100	100	100	100	100
12.	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80	81	82	83	84
13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76	77	78	79	80
14.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65	85	85	85	85
15.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen	77	78	79	80	81

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Perikanan Budi Daya (Nilai)					

Adapun target produksi perikanan budi daya berdasarkan komoditas utama adalah sebagai berikut :

No.	KOMODITAS	TAHUN					LAJU KENAIKAN
TAHUN		2025	2026	2027	2028	2029	
	NASIONAL	18 393 000	19 380 000	20 420 000	21 517 000	22 665 000	5,36
1	Udang	1.258.000	1.356.000	1.459.000	1.570.000	1.689.000	7,64
2	Rumput Laut	11.640.000	12.222.000	12.833.000	13.475.000	14.140.000	4,98
3	Bandeng	946.000	993.000	1.044.000	1.098.000	1.154.000	5,09
4	Kerapu	20.000	21.000	23.000	24.000	24.000	4,72
5	Kakap	12.000	12.000	13.000	15.000	16.000	7,60
6	Kekerangan	44.000	46.000	47.000	48.000	50.000	3,25
7	Ikan Mas	614.000	650.000	688.000	727.000	769.000	5,79
8	Nila	1.555.000	1.660.000	1.776.000	1.894.000	2.019.000	6,75
9	Lele	1.271.000	1.354.000	1.445.000	1.541.000	1.640.000	6,58
10	Patin	355.000	362.000	370.000	379.000	387.000	2,18
11	Gurame	211.000	223.000	235.000	247.000	261.000	5,46
12	Kepiting	22.000	23.000	25.000	26.000	27.000	5,27
13	Lobster	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	8,78
14	Lainnya	444.000	456.900	460.800	471.700	487.600	2,37
Ikan		5.495.000	5.802.000	6.128.000	6.472.000	6.836.000	5,61
Rumput Laut		11.640.000	12.222.000	12.833.000	13.475.000	14.140.000	4,98
Udang		1.258.000	1.356.000	1.459.000	1.570.000	1.689.000	7,64

■ KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD dan DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat perikanan budi daya. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi lembaga Pengelola modal usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit program lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah- langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah luar negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Prinsip yang diacu adalah bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Budi Daya harus fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar

harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan pembangunan perikanan budidaya menurut program dan kegiatan disajikan di lampiran II.



PENUTUP

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan nasional .

Melalui Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029, pembangunan perikanan budi daya akan dilakukan dengan pendekatan kluster, korporasi, digitalisasi, dan keberlanjutan , didukung oleh kebijakan dan regulasi yang kondusif serta kelembagaan yang kuat.

Dengan sinergi antar instansi, partisipasi aktif pembudidaya, serta kolaborasi dengan mitra strategis, Renstra DJPB ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendorong transformasi sektor perikanan budi daya menuju Indonesia Emas 2045.



DRAFT
RENSTRA DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN I. KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDI DAYA 2025 – 2029

REGULASI	URGENSI	DUE DATE	PIC UKE II
Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Kawasan Tambak di Pantai Utara Jawa	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Proyek Strategis Nasional)	2025	Dit. Ikan Air Payau
Instruksi Presiden tentang Pelaksanaan Budi Daya Udang Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Akselerasi peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan ekspor komoditas udang nasional	2025	Dit. Ikan Air Payau
Instruksi Presiden tentang Percepatan Hilirisasi Produk Rumput Laut	Percepatan program hilirisasi sektor kelautan dan perikanan	2026	Dit. Rumput Laut
Peraturan Presiden tentang Penetapan Komoditas Perikanan Budi Daya sebagai Bagian dari Program Makan Bergizi Gratis	Menjaga ketahanan pangan yang bersumber dari protein ikan dan menjaga keberlanjutan usaha perikanan budi daya	2026	Dit. Ikan Air Payau Dit. Ikan Air Tawar Dit. Ikan Air Laut

DRAFT
RENSTRA DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025 - 2029

REGULASI	URGENSI	DUE DATE	PIC UKE II
Permen KP tentang Penetapan Potensi dan Pemanfaatan Lahan Perikanan Budi Daya	Tindaklanjut amanah PP No 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan tindaklanjut hasil audit BPK	2025	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya	Akselerasi peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan ekspor komoditas unggulan budi daya dengan pendekatan kawasan secara utuh dan berjenjang di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	2026	Dit. Ikan Air Payau Dit. Ikan Air Tawar Dit. Ikan Air Laut Dit. Rumput Laut
Permen KP Tentang Subsidi Pupuk Subsektor Perikanan	Perlu adanya pengaturan sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi subsektor perikanan	2025	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Pemanfaatan Irigasi Perikanan	amanah Pasal 7 ayat 2 PP No. 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.	2025	Dit. Prasarana dan Sarana
Permen KP tentang Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan.	amanah Pasal 46 ayat 3. PP No 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	2025	Dit. Prasarana dan Sarana



DRAFT
RENSTRA DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN II. KERANGKA PENDANAAN PER PROGRAM, PER KEGIATAN DAN PER OUTPUT DITJEN PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2025 - 2029

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

- 1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 2 Program : Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
 3 Sasaran Program yang Didukung : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
 4 Kegiatan : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau
 5 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 6 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (Output) (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3)	Target 2026 (4)	Alokasi 2026 (5)	Dimensi (6)	Bidang (7)	Nawacita (8)	Dukungan (9)
1	Penyidikan dan Pengujian Penyakit (BJC)		2.190 Sampel					
		Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	2.190 Sampel	845.888.000				
2	Penyidikan dan Pengujian Penyakit (QJC)		285 Sampel					
		Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	160 Sampel	247.380.000				
		Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	75 Sampel	89.800.000				
		Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	50 Sampel	28.105.000				
Jumlah				1.211.173.000				

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

- | | |
|---|--|
| 1 Kementerian/Lembaga | : Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 2 Program | : Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya |
| 3 Sasaran Program yang Didukung | : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya |
| 4 Kegiatan | : Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar |
| 5 Unit Organisasi | : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya |
| 6 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP) | |

No.	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2026	Alokasi 2026	Dimensi	Bidang	Nawacita	Dukungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyidikan dan Pengujian Penyakit		100 Sampel					
		Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	100 Sampel	56.222.000				
2	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan		2 Unit					
		Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	2 Unit	105.000.000				
Jumlah				161.222.000				

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

- 1 Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 2 Program : Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
 3 Sasaran Program yang Didukung : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
 4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 5 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 6 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program (IKP)

No. (1)	Sasaran Kegiatan (Output) (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (3)	Target 2026 (4)	Alokasi 2026 (5)	Dimensi (6)	Bidang (7)	Nawacita (8)	Dukungan (9)
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal		3 Layanan					
		Layanan Umum	1 layanan	25.872.000				
		Layanan Perkantoran	1 layanan	8.732.890.000				
		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke Bawah)	1 layanan	7.284.000				
2	Layanan Manajemen Kinerja Internal		2 Layanan					
		Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	1 Layanan	16.840.000				
		Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	1 Layanan	6.808.000				
		Jumlah		8.789.694.000				

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

7 Rincian Kegiatan

A. Perhitungan Pendanaan (Tahun 2026 dan Perkiraan Maju)

Kode	Kegiatan	Indikasi Pendanaan tahun 2026					Prakiraan Kebutuhan (juta rupiah)		
		Rupiah	PLHN	PNBP	SBSN	Jumlah	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7 = (3)+(4)+(5)+(6)	8	9	10
1	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	435.285.000	-	775.888.000	-	1.211.173.000	1.332.290.300	1.465.519.330	1.612.071.263
2	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	161.222.000	-	-		161.222.000	177.344.200	195.078.620	214.586.482
3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	8.789.694.000	-	-	-	8.789.694.000	9.668.663.400	10.635.529.740	11.699.082.714
Jumlah		9.386.201.000	-	775.888.000,000	-	10.162.089.000	11.178.297.900	12.296.127.690	13.525.740.459

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

B. Sumber Pendanaan

No.	Sasaran Kegiatan (Output/Komponen)	Jenis Komponen (BAK/BLK)	Indikasi Pendanaan Tahun 2026 (juta rupiah)					Lokasi
			Rupiah	PHLN	PNBP	SBSN	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= (4)+(5)+(6)+(7)	
1	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau	BAK/BLK	70.000.000	-	775.888.000	-	845.888.000	2901
2	Sampel Monitoring Residu Ikan Air Payau yang diuji	BAK/BLK	247.380.000	-	-	-	247.380.000	2901
3	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang diuji	BAK/BLK	89.800.000	-	-	-	89.800.000	2901
4	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	BAK/BLK	28.105.000	-	-	-	28.105.000	2901
5	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	BAK/BLK	56.222.000	-	-	-	56.222.000	2901
6	Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	BAK/BLK	105.000.000	-	-	-	105.000.000	2901
7	Layanan Umum	BAK/BLK	25.872.000	-	-	-	25.872.000	2901
8	Layanan Perkantoran	BAK/BLK	8.732.890.000	-	-	-	8.732.890.000	2901
9	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke Bawah)	BAK/BLK	7.284.000	-	-	-	7.284.000	2901
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	BAK/BLK	16.840.000	-	-	-	16.840.000	2901
11	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke Bawah)	BAK/BLK	6.808.000	-	-	-	6.808.000	2901
Jumlah			9.386.201.000	-	775.888.000	-	10.162.089.000	

Formulir 3 Rincian Renja K/L Per Kegiatan

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan (Output/Komponen)	Sumber/ Loan	Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (juta rupiah)							
			Jenis PHLN (P/H/KE)	Pagu (Sesuai MoA)	Penyerapan s/d Desember	Tanggal Mulai	Tanggal Tutup	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	PLN/PDN	Hibah	(11)
1								-	-	-
Jumlah					-			-	-	-



Serang, 2 Januari 2026

Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Toha Tusihadi